

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain, penyediaan barang-barang public (*public goods*) dan pelayanan public (*service goods*) dapat lebih terjamin.

Melalui pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan (Makmun, 2004).

Otonomi daerah yang mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 telah menghasilkan berbagai implikasi menyangkut aspek kelembagaan pemerintahan, hubungan antar unit pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik. Fenomena turunan dari beberapa implikasi yang keduanya saling berhubungan seperti dua sisi mata uang adalah isu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta isu pemekaran wilayah. Khusus pada isu kedua, dari berbagai alasan yang melatarbelakangi adanya keinginan pemekaran daerah pasca penerapan otonomi daerah, salah satunya terdapat motif ekonomi (Amri P.D. dalam Nurman, 2013).

Di era otonomi, setiap daerah berlomba-lomba mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah (Djadjuli, 2018).

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pengeluaran infrastruktur dan kegiatan produksi lainnya. Pengeluaran produktif yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum akan mendorong pembangunan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur mendorong Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Khawarizmi et al., 2021). Karena dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan mengundang minat para investor yang secara umum membantu menggiatkan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu saja membuka berbagai lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran (Sahiet al., 2020). Belanja modal merupakan salah satu komponen yang dapat di andalkan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Sebab, dengan semakin tingginya belanja modal maka akan semakin tinggi pula produktivitas ekonomi. Menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut Henry Gerungan (Gerungan et al., 2017) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Dana Transfer adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang

disebutkan dalam perintah dana transfer sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Menurut Suandi (2016) tujuan dari dana transfer kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Dengan adanya dana transfer ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui pendapatan asli daerah (PAD). Namun dalam praktiknya dana transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama pendanaan utama pemerintah daerah dalam membiayai operasional daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tiap – tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dari masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab serta diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil.

Hal di atas juga diperkuat oleh temuan Simanjuntak (2010) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah sebagai salah satu implikasi dari kebijakan

desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi upaya penurunan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan kemiskinan didefinisikan sebagai penurunan kualitas berbagai aspek kehidupan, baik kebutuhan dasar, pendapatan rumah tangga maupun keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan merupakan dampak kebijakan desentralisasi yang cukup penting (Risalam, 2013).

Esensi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga pertimbangan. *Pertama*, pertumbuhan dilihat sebagai sesuatu yang objektif dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumberdaya dalam sektor publik. *Kedua*, secara eksplisit bahwa pemerintah berusaha untuk mengadopsi berbagai kebijakan – kebijakan untuk mendorong ke arah peningkatan dalam pendapatan per kapita. *Ketiga*, pertumbuhan per kapita relatif lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibanding indikator-indikator ekonomi lainnya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan

asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan & Karmini, 2013) memperoleh kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, (Salim, 2019) melakukan penelitian dengan kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Kemudian, (Ernita *et al.*, 2020) juga melakukan penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga memiliki hubungan berpengaruh tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga memperoleh kesimpulan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

1.2. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi

masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2005). Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien. Dana transfer yang diterima pemerintah daerah merupakan pembagian yang harus diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang disebut otonomi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan?
5. Bagaimana pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan?

6. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan?
7. Bagaimana pengaruh dana pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan?
4. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Menganalisis pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Menganalisis pengaruh dana pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan kedepannya, khususnya kebijakan pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) dalam mendorong pembangunan ekonomi penanggulangan tingkatkemiskinan.
2. Dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil kebijakan dalam mengembangkan Pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuanyang ada.
3. Bagi Akademis dan peneliti selanjutnya agar dapat menjadi tambahan referensi mengenai pemahaman konsep dana transfer ke daerah dan pertumbuhan ekonomi serta kesmiskinan dan dapat menjadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.